

**Studi Analisis Perkara Nomor: 0222/Pdt.G/2016/PA. Plh
dan Nomor: 0472/Pdt.G/2011/PA. Plh Tentang
Kewajiban Nafkah Bagi PNS Pasca Perceraian**

TESIS

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Keluarga**

Oleh:

**HASMAWATI
NIM. 1602550146**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2018**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ
عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur hanya untuk Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan curahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua khususnya terutama kepada penulis dalam penulisan tesis ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Besar Muhammad Rasulullah SAW. dan atas keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Hanya berkat taufiq dan hidayah-Nya jugalah sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan semaksimal mungkin dengan judul “STUDI ANALISIS PERKARA NOMOR: 0222/PDT.G/2016/PA. PLH DAN NOMOR: 0472/PDT.G/2011/PA. PLH TENTANG KEWAJIBAN NAFKAH BAGI PNS PASCA PERCERAIAN”. Namun penulis menyadari dalam proses penulisan tesis ini tentunya banyak sekali mendapat bantuan bimbingan, motivasi dan dukungan yang tiada habisnya, maka dari itu penulis ingin mencurahkan dan menghaturkan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman selaku rektor Univeritas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

2. Bapak Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M. Ag selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Budi Rahmat Hakim, S. Ag, M.H selaku Pembimbing II yang sudah membimbing penulis dengan maksimal hingga selesainya tesis ini.
5. Seluruh Dosen pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin serta Seluruh Karyawan dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
6. Seluruh rekan-rekan Keluarga Besar Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
7. Kedua orangtua tercinta: H. Muh. Tahir dan Hj. Siti Hawa Tuwo yang doa'anya tak pernah putus menjadi salah satu sumber kekuatan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Suami tercinta: Muhammad Taufik Hidayat dan calon buah hati kami yang selalu membuat penulis semangat dan membantu penulis berjuang menyelesaikan tesis ini.
9. Seluruh saudara beserta keluarga Penulis dan pihak yang berpartisipasi dalam penulisan tesis ini.

Akhirnya penulis berdo'a kepada Allah SWT. semoga segala bantuan dan motivasi serta do'a yang telah diberikan kepada penulis dibalas dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis dan orang lain. *Aamiin Yaa Robbal 'Alaamiin....*

Pelaihari, 01 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
PERSETUJUAN TESIS.....	iii
PENGESAHAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK.....	xv
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Operasional/Istilah.....	13
F. Penelitian Terdahulu.....	15
G. Kerangka Teori	19
H. Metode Penelitian.....	30
I. Sistematika Penulisan.....	38

BAB II: PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

A. PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 41

1. Konsep Perceraian dan Akibat Hukumnya..... 41
2. Pengertian Pegawai Negeri Sipil..... 44
3. Perceraian Pegawai Negeri Sipil..... 50
4. Alasan Hukum Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. 53
5. Akibat Hukum Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. 54

B. TINJAUAN TENTANG PUTUSAN PERADILAN AGAMA MELIPUTI PERTIMBANGAN HUKUM DAN ASAS-ASAS HUKUM..... 57

1. Keputusan Pengadilan dan Pertimbangan Hukum..... 57
2. Kebebasan Hakim..... 61
3. Asas-Asas Hukum dan Penerapannya..... 70

BAB III: ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM PADA PERKARA NOMOR: 0222/PDT.G/2016/PA.PLH DAN NOMOR: 0476/PDT.G/2011/PA.PLH

A. PENYAJIAN BAHAN HUKUM..... 85

1. Deskripsi Pertimbangan Hukum Perkara Nomor: 0476/Pdt.G/2011/PA.Plh..... 85
2. Deskripsi Pertimbangan Hukum Perkara Nomor: 0222/Pdt.G/2016/PA.Plh..... 93

B. ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PADA PERKARA NOMOR: 0476/PDT.G/2011/PA.PLH DAN NOMOR: 0222/PDT.G/2016/PA.PLH..... 104

C. RELEVANSI PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM PADA PERTIMBANGAN HUKUM PERKARA NOMOR:

0472/PDT.G/2011/PA.PLH DAN NOMOR:
0222/PDT.G/2016/PA.PLH..... 125

BAB IV: PENUTUP

A. Simpulan
142
B. Saran-Saran.....
144

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

B. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf	Keterangan
--------------	-------------	--------------	-------------------

Arab		Latin	
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍa	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el

م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

C. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

muta'addid متعديدين

'iddah عدة

D. Ta'marbutah

1. Apabila dimatikan ditulis h.

Hibbah هبة

Jizyah جزية

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء *Karāmah al-auliyā*

3. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر *Zakātul-fiṭri*

E. Vokal Pendek

Nama	Huruf Latin	Nama	Tanda
A	A	Kasrah	ـِ
I	I	fathah	ـَ
u	U	ḍammah	ـُ

Contoh:

يُدْرِبُ – *yudribu* سُنِّلَ – *katāba* كَتَبَ

F. Vokal Panjang

Fathah + alif	ā
جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya'mati	ā
يسعى	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya'mati	ī

كريم	<i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ū
فروض	<i>furūd</i>

G. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya' mati	Ai
بينكم	<i>Bainakum</i>
Fatḥah dan wawu	Au
قول	<i>Qaul</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis “al”

1. القرآن *al-Qur'ān*
2. القياس *al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al

1. السماء *as-Samā*
2. لشمس *asy-Syams*

ABSTRAK

Hasmawati; *Studi Analisis Perkara Nomor: 0222/Pdt.G/2016/PA.Plh Dan Nomor: 0472/Pdt.G/2011/PA.Plh Tentang Kewajiban Nafkah Bagi PNS Pasca Perceraian* di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H dan II: Dr. Budi Rahmat Hakim, S. Ag, M.H, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2018.

Kata kunci: Analisis Perkara, Kewajiban Nafkah, PNS, Pasca Perceraian.

Perceraian menimbulkan akibat hukum bagi bekas suami kepada bekas istri dan anak-anaknya. Hal ini baru berlaku apabila secara yuridis telah mendapat kepastian hukum dari sebuah putusan pengadilan. Terutama menyangkut kewajiban nafkah pasca perceraian, aturan kewajiban nafkah telah diatur dalam aturan hukum Islam maupun Hukum Positif, dalam aturan hukum positif khususnya Undang-Undang Perkawinan membahas mengenai kewajiban nafkah tersebut. Aturan ini berlaku untuk semua warga Negara Indonesia pada umumnya, namun ada kekhususan aturan yang diterapkan bagi warga Negara Indonesia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45

Tahun 1990 jo. PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang perkawinan dan perceraian bagi PNS yang terdapat dalam Pasal 8. Dalam pertimbangan putusan majelis hakim tidak mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) dari pihak istri mengenai penerapan pasal tersebut, yang hal ini terdapat dalam putusan majelis hakim yang akan dianalisis yaitu perkara nomor: 0472/Pdt.G/2011/PA.Plh dan Nomor: 0222/Pdt.G/2016/PA.Plh.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dilakukan dengan dua pendekatan yaitu *state approach* dan *case approach*. Adapun objek penelitiannya ialah alasan hukum (*ratio decidendi* atau *reasoning*). Fokus penelitian ini pada pertimbangan hukum dalam perkara yang akan dianalisis dengan memperhatikan relevansi penerapan asas-asas hukum. Hasil dari penelitian ini bahwa majelis hakim tidak memiliki kekuasaan dan kebebasan dalam menerapkan hukum, sebab majelis hakim terikat dengan ketentuan yurisprudensi MARI Nomor 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003 daripada PP Nomor 45 Tahun 1990 jo. PP Nomor 10 Tahun 1983, hal ini menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, majelis hakim juga tidak konsisten dalam menerapkan hukum dan tidak memiliki kemandirian dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya. Mengenai relevansi penerapan asas-asas hukum oleh hakim terhadap putusan tersebut, bahwa majelis hakim belum memenuhi penerapan asas-asas hukum yaitu asas kebebasan/kemerdekaan hakim, asas legalitas, juga majelis hakim terkesan tidak mengindahkan asas hierarki peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 12 Tahun 2011, yang mana PP memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada yurisprudensi.

ABSTRACT

Hasmawati: Study of Case Analysis Number: 0222/Pdt.G/2016/PA.Plh And Number: 0472/Pdt.G/2011/PA.Plh About Livelihood Liability for Civil Servants Post-Divorce under the guidance of advisor I: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H and II: Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag. MH, on Graduate UIN Antasari Banjarmasin, 2018.

Keywords: Case Analysis, Livelihood Liability, Civil Servants, Post-Divorce.

Divorce raises the existence of a certain law for the former husband to his former wife and children. This applies when judicially obtaining legal certainty from a court decision. In terms of livelihood obligations, this has been regulated in the rules of Islamic law as well as the Positive Law. In the rule of positive law, this rule applies to all citizens of Indonesia, but there is a specificity of the rules applied for citizens of Indonesia with the status of Civil Servants (PNS). The regulation is contained in Government Regulation No. 45 of 1990. Government Regulation No. 10 of 1983 concerning marriage and divorce for civil servants in Article 8. The balance of the judges' decision does not grant the wife's counter-

claim concerning the application of the article, this became the case analyzed in the case number: 0472/Pdt.G/2011/PA.Plh and number : 0222/Pdt.G/2016/PA.Plh.

This research is a normative research. This research was conducted with two approaches namely state approach and case approach. The object of his research is the legal reason (*ratio decidendi* or reasoning). The focus of the research is the legal considerations in the case to be analyzed by considering the relevance of the application of legal principles. The result of this research is that the judges do not have the power and freedom to apply the law, because the judges are bound by the provisions of jurisprudence of MARI No. 11 K/AG/2001 dated July 10, 2003 rather than Government Regulation No. 45 of 1990 jo. Government Regulation No. 10 of 1983. This creates a lack of legal certainty. The panel of judges is also inconsistent in applying the law and has no independence in settling the case in hand. As for the relevance of the application of legal principles by judges to a decision, the panel of judges has not fulfilled the application of legal principles namely the principle of freedom/ independence of judges, and the principle of legality. The judges seem to ignore the principle of hierarchy of legislation that law No. 12 of 2011, because the Government Regulation has a higher position than jurisprudence.